

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN  
DI KABUPATEN KOLAKA**

**TESIS**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Memperoleh Derajat Gelar S-2  
Program Studi Magister Kebijakan Dan Pengembangan Pendidikan**



**Disusun oleh :**

**KHAIRUNNISA  
NIM: 201610240211004**

**DIREKTORAT PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
Juli 2018**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN  
DI KABUPATEN KOLAKA**

**KHAIRUNNISA  
201610240211004**

Telah disetujui

Pada hari/tanggal, **Senin / 09 Juli 2018**

Pembimbing Utama



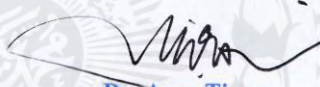
**Dr. Yuni Pantiwati**

Direktur  
Program Pascasarjana



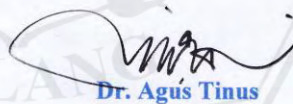
**Akhsanul Hakim, Ph.D**

Pembimbing Pendamping



**Dr. Agus Tinus**

Ketua Program Studi  
Magister Kebijakan dan  
Pengembangan Pendidikan



**Dr. Agus Tinus**

# **TESIS**

**KHAIRUNNISA**  
**201610240211004**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
pada hari/tanggal, Senin/ **09 Juli 2018**  
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Magister/Profesi di Program Pascasarjana  
Universitas Muhammadiyah Malang

## **SUSUNAN DEWAN PENGUJI**

**Ketua / Penguji : Dr. Yuni Pantiwati**  
**Sekretaris / Penguji : Dr. Agus Tinus**  
**Penguji : Dr. Lud Waluyo**  
**Penguji : Dr. Estu Widodo**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : KHAIRUNNISA

NIM : 201610240211004

Program Studi : **Magister Kebijakan Dan Pengembangan Pendidikan**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

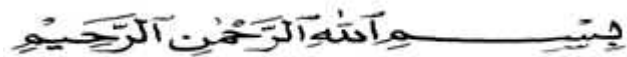
1. TESIS dengan judul : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN DI KABUPATEN KOLAKA** Adalah karya saya dan dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.
2. Apabila ternyata dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Tesis ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tesis ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 06 Agustus 2018  
Yang menyatakan,

  
**KHAIRUNNISA**

## KATA PENGANTAR



Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan proses yang cukup menyita waktu dengan judul” Implementasi Kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun Di Kabupaten Kolaka”

Shalawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Dengan risalah yang diterimanya, nilai-nilai pendidikan dan kerahmatan mampu mengibarkan semangat keislaman dan pengabdian kepada Allah. Dan dengan teladan akhlaknya dapat menumbuhkan aspirasi ummat untuk menyempurnakan ibadah dalam kehidupan.

Penulisan tesis ini sebagai salah satu syarat kelulusan yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan program S2 Magister Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Malang.

Terselesaikan tesis ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan dorongan moral yang besar dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

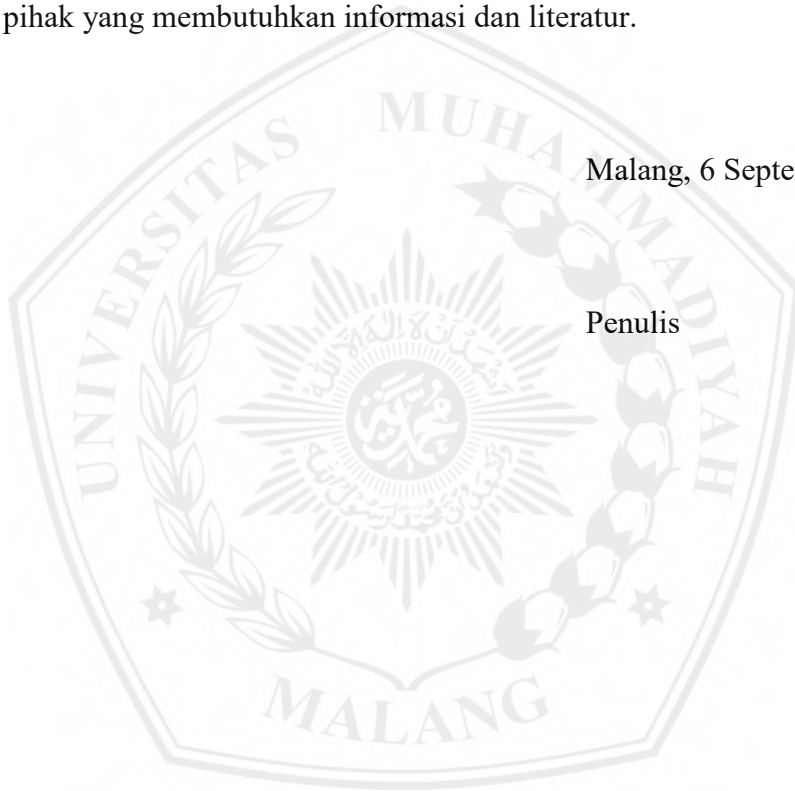
1. Bapak Drs. Fauzan, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang
2. Akhsanul in'am, Ph.D selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti Program Strata 2(S2)
3. Dr. Agus Tinus, M.Pd selaku ketua program studi Magister Kebijakan Dan Pengembangan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang dan dosen pembimbing pendamping yang telah sabar memberikan bimbingan, arahan selama proses penentuan judul, penyusunan proposal, penelitian, hingga penyusunan hasil penelitian dan tesis.
4. Dr. Yuni Pantiwati, MM, M.Pd selaku dosen pembimbing utama yang dengan telaten memberikan bimbingan dan arahan selama proses penentuan judul, penyusunan proposal, penelitian, hingga penyusunan hasil penelitian dan tesis.

5. Bapak dan ibu dosen pasca sarjana Program Studi Magister Kebijakan Dan Pengembangan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan berbagai ilmu yang bermanfaat.
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang selalu memberikan dukungan dan motivasi hingga tesis ini dapat terselesaikan. Semoga Allah SWT memberikan balasan setimpal atas segala pengorbanan dan bantuan yang telah diberikan.

Akhir kata penulis menyadari bahwa isi dan penyajian Tesis ini masih belum sempurna. Penulis mengharapkan agar Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan informasi dan literatur.

Malang, 6 September 2018

Penulis



## ABSTRAK

Khairunnisa. (2018). *Implementasi Kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Kolaka*. Tesis, Magister Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang, Pembimbing: (1) Dr. Yuni Pantiwati, MM, M.Pd, (2) Dr. Agus Tinus, M.Pd

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan: 1) implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Kolaka; 2) kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Kolaka ; 3) upaya sekolah dan pemerintah dalam mengatasi masalah yang dihadapi dalam implementasi wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Kolaka. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Informan dalam penelitian ini yaitu: a) Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Kolaka; b) kepala bagian pendidikan dasar dan menengah Kabupaten Kolaka; c) kepala sekolah; d) orang tua siswa; dan e) siswa. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Tahapan analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Untuk mengecek keabsahan data menggunakan triangulasi data dan sumber.

Hasil penelitian; 1) implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Kolaka terdiri dari 3 unsur utama yaitu: a) pelaksana kebijakan; b) adanya program c) sasaran kelompok. 2) kendala implementasi wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Kolaka yaitu: (a) minimnya anggaran; (b) sistem zonasi (c) kurangnya pemahaman orang tua tentang pendidikan dan kurangnya minat anak untuk sekolah; (d) ekonomi lemah; (e) sarana dan prasarana yang kurang; (f) kekurangan guru pada daerah terpencil; 3) upaya yang dilakukan pada implementasi wajib belajar 12 tahun: (a) Dinas Pendidikan memprioritaskan yang lebih penting dan mendesak; (b) sekolah menerima sesuai dengan daya tampung kelas dan peserta didik boleh mendaftar di luar wilayah zonasi (c) memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pendidikan; (d) melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar ikut berpartisipasi tanpa dipungut biaya dan memberikan beasiswa bagi anak yang kurang mampu; (e) mengajukan proposal pengadaan sarana dan prasarana; f) mengangkat guru kontrak pada daerah terpencil.

Kata Kunci: Kebijakan, Implementasi, Wajib Belajar



## ABSTRACT

Khairunnisa. (2018). Implementation of 12 Year Compulsory Education Policy in Kolaka District. Thesis, Master of Policy and Education Development University of Muhammadiyah Malang, Supervisor: (1) Dr. Yuni Pantiwati, MM, M.Pd, (2) Dr. Agus Tinus, M.Pd

The purpose of this study was to describe: 1) the implementation of the 12-year compulsory education policy in Kolaka Regency; 2) obstacles faced in the implementation of the 12-year compulsory education policy in Kolaka Regency; 3) the efforts of schools and government in addressing the problems faced in the implementation of 12-year compulsory education in Kolaka Regency. The type of research used is descriptive qualitative. The informants in this study are: a) Secretary of the Kolaka District Education Office; b) the head of the Kolaka Regency's primary and secondary education; c) principal; d) parents of students; and e) students. Data collection techniques are interviews, observation and documentation. The stages of data analysis are data reduction, data presentation and conclusions. To check the validity of the data using data and source triangulation.

Research result; 1) the implementation of the 12-year compulsory education policy in Kolaka Regency consists of 3 main elements, namely: a) implementing policies; b) program existence c) target group. 2) obstacles to the implementation of 12-year compulsory education in Kolaka Regency, namely: (a) lack of budget; (b) zoning system (c) lack of parental understanding of education and lack of children's interest in school; (d) weak economy; (e) insufficient facilities and infrastructure; (f) lack of teachers in remote areas; 3) efforts made on the implementation of 12-year compulsory education: (a) the Education Office prioritizes the more important and urgent; (b) schools accept according to the capacity of the class and students may register outside the zoning area (c) provide an understanding to the public about the importance of education; (d) socializing to the community to participate without being charged and providing scholarships for underprivileged children; (e) submit a proposal for the procurement of facilities and infrastructure; f) appoint contract teachers in remote areas.

Keywords: Policy, Implementation, Mandatory Learning



## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	i
SURAT PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
1. PENDAHULUAN.....	1
2. KAJIAN PUSTAKA .....	4
2.1 Kebijakan Publik.....	4
2.2 Implementasi Kebijakan Pendidikan .....	5
2.3 Model Implementasi .....	6
2.3.1 Model Van Meter dan Horn .....	6
2.3.2 Model Tachjan .....	7
2.4 Wajib Belajar .....	8
2.4.1 Pengertian Wajib Belajar .....	8
2.4.2 Penyelenggaraan Wajib Belajar .....	8
2.4.3 Pengelolaan Wajib Belajar .....	9
2.4.4 Penjaminan Wajib Belajar.....	9
2.4.5 Pengawasan Wajib Belajar.....	9
2.4.6 Indikator Pelaksanaan Wajib Belajar .....	10
2.4.7 Kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun.....	10
3. METODE PENELITIAN .....	10
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	10
3.2 Lokasi Penelitian dan Subyek Penelitian.....	10
3.3 Data dan Sumber Data .....	11
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	11
3.5 Teknik Analisis Data.....	12
3.6 Pengujian Keabsahan Data .....	12
4. HASIL PENELITIAN.....	13
4.1 Implementasi wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Kolaka .....	13

4.1.1	Pelaksana kebijakan wajib belajar 12 tahun.....	13
4.1.1.1	Dinas Pendidikan .....	13
4.1.1.2	Satuan Pendidikan.....	17
4.1.2	Program.....	20
4.1.3	Sasaran Wajib Belajar 12 tahun .....	21
4.2	Kendala Yang Dihadapi Dalam Implementasi Wajib Belajar 12 Tahun .....	23
4.3	Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Masalah Dalam Implementasi Wajib Belajar 12 Tahun .....	25
5.	PEMBAHASAN .....	26
5.1	Implementasi Wajib Belajar 12 Tahun Di Kabupaten Kolaka .....	26
5.2	Kendala Yang Dihadapi Dalam Implementasi Wajib Belajar 12 Tahun .....	29
5.3	Upaya Terhadap Kendala Dalam Implementasi Wajib Belajar 12 Tahun .....	32
6.	PENUTUP.....	33
6.1	Simpulan.....	33
6.2	Saran.....	34
	RUJUKAN.....	35

## DAFTAR TABEL

Anggaran Pendidikan .....	16
Angka Partisipasi Murni dan Kasar .....	21
Angka Putus Sekolah .....	22



## **1. PENDAHULUAN**

Pendidikan adalah suatu proses dalam rangka mempengaruhi peserta didik supaya mampu menyesuaikan diri sebaik mungkin dalam lingkungannya serta dengan demikian akan menimbulkan perubahan-perubahan dalam dirinya yang memungkinkan pendidikan tersebut berfungsi dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan merupakan sarana yang sangat penting dalam membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas yang mampu bersaing dalam menghadapi era globalisasi (Zamzuri, 2016). Pendidikan memiliki peran penting dalam mempersiapkan sumber daya manusia dalam pembangunan suatu negara (Musyaddad, 2013). Oleh karena itu pendidikan sangat penting dalam mempersiapkan sumber daya manusia dalam pembangunan suatu bangsa dan negara.

Pendidikan juga mempunyai peran yang strategis yaitu menyiapkan generasi yang berkualitas untuk kepentingan masa depan. Melalui pendidikan akan lahir sumber daya manusia yang berkualitas, terampil, dan terasah untuk menghadapi berbagai tantangan zaman yang akan datang (Montolalu, 2015). Pendidikan sebagai pilar masa depan yang menjadikan hal tersebut wajib di dapatkan oleh setiap individu (Nur Millah, Ruyadi, & Nurdin, 2015). Pendidikan dapat membantu manusia untuk meyiapkan generasi menjadi sadar terhadap peran dan tanggung jawabnya dan meyediakan generasi yang berkualitas untuk menghadapi tantangan masa depan.

Sesuai dengan hasil penelitian bahwa pendidikan telah dominan meningkatkan kesetaraan dan keadilan sosial serta memainkan peran kunci dalam membentuk kemampuan manusia untuk mengembangkan kapasitas manusia agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan (Todaro, P, & Stephen C. Smith, 2003) &(Ar, Usman, & Nasir, n.d.). Pendidikan salah satu aspek terpenting bagi pembangunan bangsa dan negara, menyadari hal itu maka pada tahun 1994 telah dimulai program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) yang didasari dengan konsep “pendidikan dasar untuk semua” yang pada hakekatnya berarti penyediaan akses yang sama untuk semua anak.

Undang-undang Dasar 1945 telah menyatakan secara tegas bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa salah satu cara untuk dapat mencapai tujuan tersebut yaitu dengan pendidikan.

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara yang sangat berperan penting bagi kesuksesan dan kesinambungan pembangunan suatu bangsa. Adapun penjabaran lebih lanjut mengenai pendidikan tersebut yaitu tercantum pada pasal 31 ayat 1 yang berbunyi “ Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Menjalankan sistem tersebut, pemerintah mengeluarkan program wajib belajar 9 tahun yang ditujukan untuk peserta didik SD dan SMP. Sebagaimana dalam Undang-undang Sisdiknas No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 6 ayat (1) bahwa setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dan selanjutnya pada pasal 17 ayat (2) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan dasar adalah berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat (Republik Indonesia, 2003). Wajib belajar ini diharapkan untuk memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Program wajib belajar merupakan salah satu program pendidikan yang telah dicanangkan oleh pemerintah untuk anak-anak usia sekolah sampai dengan jenjang yang telah ditentukan yakni SMA, terlebih lagi ketika diberlakukannya otonomi daerah maka secara otomatis pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk menentukan sampai jenjang mana pelaksanaan program pendidikan wajib belajar sekolah menengah di daerah yang akan dilaksanakan atau dijalankan. Pemberian otonomi ini dimaksudkan untuk lebih memandirikan daerah dan memberdayakan masyarakat sehingga lebih leluasa dalam mengatur dan melaksanakan kewenangan atas prakarsa sendiri (Putera, 2010)

Program wajib belajar 12 tahun terdiri dari jenjang pendidikan dasar dan menengah yakni pada jenjang SD, SMP sampai dengan jenjang SMA. Menurut penelitian sebelumnya (Ratnawati, Suwitri, & Rengga, 2013) bahwa tujuan dari program wajib belajar 12 tahun adalah meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan menengah yang berkualitas dan terjangkau untuk seluruh penduduk

dan diharapkan dengan adanya program ini masyarakat dapat mengenyam pendidikan minimal sampai dengan SMA atau sederajat. (Kusuma, Suhartono, & Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, 2013). Mengatakan bahwa keseriusan pemerintah dalam menjaga kesinambungan Program Wajib Dikdas 9 Tahun dan banyaknya lulusan SMP sederajat yang tidak melanjutkan sekolah serta masih belum layak bekerja sehingga bila tidak sekolah akan memiliki dampak sosial kurang baik maka pada tahun 2013 yang lalu pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan Program Wajib Belajar 12 Tahun atau yang lebih dikenal dengan Pendidikan Menengah Universal (PMU) (Welly, 2015). Pendidikan Menengah Universal merupakan suatu program yang dikeluarkan oleh pemerintah yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah.

Program Pendidikan Menengah Universal (PMU) merupakan tahapan paling awal dari implementasi Wajib Belajar 12 Tahun, karena belum semua daerah mampu dan siap melaksanakan kebijakan tersebut. Penggunaan kata “Wajib Belajar” diganti dengan “Pendidikan Menengah Universal” (Handayani, 2012). Hal ini sesuai juga dengan kebijakan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (renstra) Kementrian Pendidikan Nasional bahwa salah satu tujuan yang akan dicapai dari pembangunan pendidikan menengah adalah tersedia dan terjangkau layanan pendidikan menengah yang bermutu, relevan dan berkesetaraan di semua provinsi dan kota. Pendidikan menengah universal yang menjadi sasarannya yaitu setiap warga negara yang berusia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang artinya bahwa setiap warga negara yang berusia 7-18 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar sampai dengan SMA.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Sistem Pendidikan Daerah pada pasal 5 ayat (1) bahwa warga masyarakat yang berusia 7 (tujuh) sampai 18 (delapan belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dan menengah sampai tamat (Kabupaten Kolaka, 2014). Akan tetapi mulai tahun 2017 SMA/MA/SMK akan dialihkan ke Provinsi meskipun demikian Kabupaten Kolaka tetap melaksanakan program wajib belajar 12 tahun dengan mengacu pada Permendikbud no 80 tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal. Berdasarkan Perda tersebut dapat di pahami bahwa Program Wajib Belajar 12 tahun yaitu usia tujuh (7) sampai delapan belas (18) tahun untuk

seluruh masyarakat usia sekolah untuk mengikuti pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan yang dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan yang melibatkan orang, kelompok, dan lembaga masyarakat.

Berdasarkan permasalahan yang penulis dapatkan bahwa penuntasan program wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Kolaka belum terlaksana secara maksimal di tandai dengan masih adanya anak usia sekolah yang tidak mengenyam pendidikan. Hal ini Sesuai dengan data angka putus sekolah yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kolaka tahun 2017 yaitu untuk SD: 45 orang, SMP: 264 orang dan SMA: 725 orang

Berdasarkan data Angka Putus Sekolah di atas, dapat diketahui bahwa masih terdapat anak yang putus sekolah di Kabupaten Kolaka dan yang paling tinggi yaitu pada jenjang SMA. Dari data angka putus sekolah tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa masih terdapat murid/siswa di Kabupaten Kolaka yang tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMA atau yang sederajat selama di terapkannya kebijakan wajib belajar 12 tahun.

Adapun permasalahan yang lain adalah banyak anak-anak usia sekolah yang seharusnya duduk di bangku sekolah malah tidak sekolah dan ada sebagian yang lebih memilih untuk bekerja. Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun dan apa kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun.

Sehubungan dengan permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, maka penelitian ini diarahkan pada rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana implementasi kebijakan program wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Kolaka?; 2) Apa kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan program wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Kolaka?; 3) Bagaimana upaya sekolah dan pemerintah dalam mengatasi masalah yang dihadapi dalam melaksanakan kebijakan program wajib belajar 12 di Kabupaten Kolaka?

## **2. KAJIAN PUSTAKA**

### **2.1 Kebijakan Publik**

Kebijakan dapat diartikan sebagai kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan atau rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam



pelaksanaan suatu pekerjaan, atau dimaksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran (Onisimus, 2013). Sedangkan bila menjadi kebijakan publik dapat diartikan sebagai pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah (Dunn & William, 2003).

Menurut Tilaar (2009) kebijakan pendidikan adalah keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang merupakan penjabaran dari visi dan misi pendidikan, dalam rangka tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu waktu kurun tertentu. Kebijakan mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Kebijakan publik mengisyaratkan adanya pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung satu dengan yang lainnya, dimana di dalamnya keputusan untuk melakukan tindakan yang di buat oleh badan atau kantor pemerintah. Suatu kebijakan apabila telah di buat, maka harus di implemetasikan untuk dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi sumber daya finansial dan manusia, serta dievaluasi agar dapat dijadikan sebagai mekanisme pengawasan terhadap kebijakan tersebut sesuai dengan kebijakan itu sendiri. Kebijakan sebagai jawaban terhadap suatu masalah karena berupaya memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur, inovasi, dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah (Tahir, 2012).

## **2.2 Implementasi Kebijakan Pendidikan**

Implementasi kebijakan adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang bertujuan melaksanakan keputusan pemerintah atau keputusan legislasi negara yang telah dibuat atau dirumuskan sebelumnya (Wahab, 2015). Implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan (Saputra, 2017).

Kebijakan pendidikan menyangkut keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan, dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu kurun waktu tertentu (Rusdiana, 2015). Selanjutnya menurut (Fattah, 2014) menjelaskan bahwa kebijakan dalam pendidikan ditetapkan oleh pemerintah yang mengatur pengelolaan sekolah, pemerintah yang diatur tidak hanya kurikulum, pedagogi, dan penilainnya, tetapi juga kondisi guru dan pemeliharaan saran fisik sekolah.

Idealnya dalam implementasi kebijakan pendidikan, baik pemerintah, masyarakat, serta sekolah secara bersama-sama dan saling bahu-membahu dalam bekerja dan melaksanakan tugas-tugasnya demi suksesnya implementasi kebijakan. Suatu kebijakan akan sulit dilaksanakan jika pada tahap implementasinya tidak cukup memperoleh dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut. Proses pengimplementasian suatu kebijakan dapat dipengaruhi oleh dua unsur yakni adanya program (kebijaksanaan) yang akan dilaksanakan dan adanya unsur pelaksana (implementer) baik dalam bentuk organisasi maupun perorangan yang akan bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam proses implementasi kebijakan (Wirmansyah, 2015)

### **2.3 Model Implementasi Kebijakan**

Model adalah (suatu pengejawantahan dari sesuatu yang lain, yang dirancang untuk tujuan tertentu). Untuk memperkaya pemahaman tentang berbagai faktor yang terkait di dalam implementasi dan mempermudah pekerjaan dalam memahami realita implementasi kebijakan maka pada bagian ini ada tiga teori implementasi kebijakan yang dapat dijadikan sebagai landasan pijak dalam penelitian ini yaitu:

#### **2.3.1 Model Van Meter dan Van Horn**

Van Meter dan van Horn (Anti, 2015) mengemukakan ada enam (6) variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan, yakni:

- a. Standart dan sasaran kebijakan. Dinas Pendidikan Kabupaten Kolaka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab harus sesuai dengan peraturan yang ada dan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

- b. Sumber daya. Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia yaitu sumber daya manusia, sumber daya finansial dan sumber daya waktu.
- c. Karakteristik agen pelaksana. Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan non formal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan publik.
- d. Sikap dan kecenderungan para pelaksana. Dalam melaksanakan program wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Kolaka maka perlu mengetahui persepsi implementor mengenai kebijakan yang akan diimplementasikan.
- e. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam [roses suatu implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi begitupun sebaliknya.
- f. Kondisi sosial, ekonomi dan politik. Kondisi ekonomi orang tua sangat berpengaruh terhadap partisipasi orang tua dalam menyekolahkan anaknya, demikian pula dengan kondisi sosial orangtua, status sosial dan pendidikan orang tua sangat mempengaruhi terhadap pendidikan anaknya. Begitupu dengan kondisi politik.

### **2.3.2 Model Tachjan**

(Tachjan, 2006) menjelaskan bahwa ada beberapa unsur yang mutlak harus ada dalam implementasi sebuah kebijakan yaitu:

- a. Unsur pelaksana. Pelaksanaan kebijakan merupakan pihak-pihak yang menjalankan baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.
- b. Adanya program yang dilaksanakan. Kebijakan publik tidak mempunyai arti penting tanpa adanya tindakan nyata yang dilakukan dengan berbagai program atau kegiatan.
- c. Kelompok sasaran. Kelompok sasaran adalah sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang atau jasa yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan.

## **2.4 Wajib Belajar**

### **2.4.1 Pengertian Wajib Belajar**

Wajib belajar merupakan program pendidikan yang harus diikuti oleh warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah (UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Sedangkan menurut (Soedijarto, 2008) pengertian wajib belajar sebagai terjemahan dari “*Compulsary Education*” merujuk pada suatu kebijakan yang mengharuskan warga negara dalam usia sekolah untuk mengikuti pendidikan sekolah sampai pada jenjang tertentu dan pemerintah memberikan dukungan sepenuhnya agar peserta wajib belajar dapat mengikuti pendidikan.

Program wajib belajar 12 tahun merupakan kewajiban bagi setiap warga negara yang telah tamat SMP atau sederajat dengan batas usia 16-18 tahun untuk mengikuti pendidikan SMA atau sederajat sampai tamat (Aulia, 2012). Adapun tujuan wajib belajar adalah untuk memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri dalam bermasyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sedangkan wajib belajar berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia. (PP nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar).

### **2.4.2 Penyelenggaraan Wajib Belajar**

Penyelenggaraan wajib belajar diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal. Pada jalur formal dilaksanakan pada jenjang pendidikan dasar yaitu SD, MI, SMP, MTs, dan bentuk lain yang sederajat. Sedangkan pada pendidikan non formal dilaksanakan melalui program paket A, B, C dan bentuk lain yang sederajat. Untuk pendidikan informal dilaksanakan melalui pendidikan keluarga atau pendidikan lingkungan (PP nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar)

Penyelenggaraan wajib belajar pada satuan pendidikan yaitu wajib menerima peserta didik dari lingkungan sekitarnya dan sesuai dengan daya tampung dan melaksanakan wajib belajar yang bermutu dan memenuhi standar nasional pendidikan. Sedangkan pengelolaan wajib belajar menurut PP no 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar yaitu wajib belajar secara nasional menjadi

tanggung jawab Menteri, tanggung jawab Kepala Daerah baik pada tingkat Provinsi Kabupaten/Kota dan pada tingkat satuan pendidikan dasar menjadi tanggung jawab pemimpin satuan pendidikan dasar dan menengah.

#### **2.4.3 Pengelolaan Wajib Belajar**

Pengelolaan wajib belajar menurut PP 47 tahun 2008 tentang wajib belajar bahwa pengelolaan wajib belajar secara nasional adalah tanggung jawab Pemerintah, tanggung jawab Kepala Daerah pada tingkat Provinsi kabupaten/kota sedangkan pada tingkat satuan pendidikan adalah tanggung jawab pimpinan satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Pemerintah daerah dapat meningkatkan jenjang pendidikan wajib belajar sampai pada pendidikan menengah dan Pemerintah Daerah berhak mengatur sesuai dengan kondisi daerah masing-masing melalui Peraturan Daerah serta mencantumkan kebijakan di bidang pendidikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Peraturan Perundang-undangan daerah bidang pendidikan.

#### **2.4.4 Penjaminan Wajib Belajar**

Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah tanpa memungut biaya dan memberikan biaya pendidikan kepada warga negara yang orang tuanya kurang mampu. Pemerintah Provinsi/Kota daerah juga menjamin ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang belum memenuhi Standar pelayanan Minimal dan ketersediaan sumber daya di bidang pendidikan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat lintas Kabupaten/Kota diwilayahnya untuk pelaksanaan wajib belajar. Setiap warga negara Indonesai usia sekolah wajib mengikuti program wajib belajar dan pemerintah Kabupaten/Kota wajib mengupayakan agar setiap warga negara Indonesia yang usia sekolah wajib mengikuti program wajib belajar.

#### **2.4.5 Pengawasan Wajib Belajar**

Pemerintah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan program wajib belajar secara nasional sedangkan pemerintah daerah melakukan pengawasan penyelenggaraan program wajib belajar pada satuan pendidikan di daerah masing-masing. Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dewan pendidikan, dan

komite sekolah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan program wajib belajar sesuai dengan kewenangan masing-masing.

#### **2.4.6 Indikator Pelaksanaan Wajib Belajar**

Untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, maka pemerintah telah menentukan beberapa indikator antara lain: angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni dan angka partisipasi sekolah (Herisusanto & Radhiah, 2015).

#### **2.4.7 Kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun Kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun**

Kebijakan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Kolaka dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Kolaka Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Pendidikan Daerah yang terdapat dalam pasal 5 ayat (1) bahwa warga masyarakat yang berusia 7 (tujuh) sampai 18 (delapan belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dan menengah sampai tamat (Kabupaten Kolaka, 2014)

Wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Kolaka dilaksanakan mulai pada jenjang pendidikan dasar sampai dengan menengah yang meliputi SD, MI, SMP, MTs, SMA, MA, SMK dan bentuk lain yang sederajat dan Pemerintah daerah berkewajiban menyediakan dana guna menuntaskan program wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Kolaka.

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan kualitatif, metode kualitatif merupakan studi yang mendalam menggunakan teknik pengumpulan data langsung dari orang dalam lingkungan alamiahnya. Pada penelitian kualitatif, peneliti menguraikan secara deskriptif mengenai implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Kolaka.

#### **3.2 Lokasi Penelitian dan Subyek Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Kolaka dan beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Kolaka yaitu di SDN 2 Lamokato, SMPN 2 Kolaka dan SMA Negeri 1 Kolaka di Kabupaten Kolaka. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli sampai dengan September 2017. Data diambil dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi dengan subyek

penelitian adalah: 1) Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Kolaka; 2) Kepala bidang pendidikan dasar dan menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Kolaka; 3) Kepala Sekolah; 4) Orang tua siswa; 5) Siswa. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi program wajib belajar 12 Tahun di Kabupaten Kolaka.

### **3.3 Data dan Sumber Data**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif sumber data utamanya adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Moleong, 2005) Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang merupakan sumber data dan diperoleh secara langsung dari sumber asli atau informan pertama yaitu: Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepala Bidang Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah mengenai: a) implementasi wajib belajar 12 tahun; b) kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan wajib belajar 12 tahun c) upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan wajib belajar 12 tahun. Adapun data sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa arsip-arsip dokumen tentang pelaksanaan program wajib belajar yang diperoleh dari Kantor Pemerintahan, Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan di Kabupaten Kolaka, sarana dan prasarana, serta tenaga kependidikan. Kemudian dilanjutkan dengan observasi lapangan dan pengambilan dokumentasi.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Kegiatan observasi yaitu peneliti mengamati secara langsung kondisi sekolah dan proses belajar mengajar yang ada di SD 2 Lamokato, SMPN 2 Kolaka dan SMA Negeri I Kolaka. Wawancara dilakukan oleh peneliti terhadap responden yang terkait dengan program wajib belajar 12 tahun yaitu Dinas Pendidikan, Kepala sekolah dengan memberikan pertanyaan yang ada pada pedoman wawancara mengenai proses penyelenggaraan program wajib belajar 12 tahun, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah dalam pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun. Dokumentasi dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data-data yang tidak bisa diperoleh melalui



wawancara. Adapun dokumen yang diperlukan yaitu informasi mengenai implementasi wajib belajar 12 tahun maka peneliti memerlukan data arsip berupa kebijakan tentang wajib belajar 12 tahun, jumlah peserta didik, jumlah guru, data sarana dan prasarana yang dapat diperoleh melalui Dinas pendidikan, dan Satuan Pendidikan.

### **3.5 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini mengacu pada tahapan yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman (2005) yaitu menggunakan empat tahapan sebagai berikut: 1) Pengumpulan data, yaitu pada tahap ini, seluruh data yang telah diperoleh mengenai implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan wajib belajar 12 tahun dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah dalam pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di kumpulkan menurut klasifikasinya masing-masing. 2) Reduksi data, yaitu peneliti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan membuang yang tidak perlu dari data yang telah dikumpulkan. 3) Penyajian data, setelah direduksi, selanjutnya peneliti menyajikan data. Data yang disajikan merupakan data yang telah direduksi. Penyajian data berupa pengelompokan data sesuai dengan tema yang telah ditentukan berdasarkan rumusan masalah penelitian. Penyajian data disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif agar mudah dipahami dan menentukan kerja selanjutnya. 4) Penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan berdasarkan data-data yang telah disajikan dan kemudian disimpulkan sesuai dengan fokus dan rumusan masalah dalam penelitian sehingga didapat kesimpulan yang bermakna.

### **3.6 Pengujian Keabsahan Data**

Pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif adalah menggunakan teknik triangulasi yang dilakukan baik dengan sumber maupun metode, atau melalui cek, cek ulang, dan cek silang pada dua atau lebih sumber informasi. Teknik triangulasi data yang paling banyak digunakan adalah pemeriksaan sumber lainnya yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berada dalam metode kualitatif (Moleong, 2005). Pada bagian ini peneliti mengecek data mengenai implementasi wajib belajar 12 tahun, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan

wajib belajar 12 tahun dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan wajib belajar 12 tahun yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.

#### **4. HASIL PENELITIAN**

Setelah peneliti datang ke lapangan dengan mengambil, mengolah dan menganalisis data ditemukan beberapa hal sebagai berikut:

##### **4.1 Implementasi Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Kolaka**

Pada bagian ini, peneliti memaparkan hasil temuan berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dari berbagai responden mengenai implementasi wajib belajar 12 tahun yang dideskripsikan sebagai berikut:

###### **4.1.1 Pelaksana Kebijakan Wajib Belajar 12 tahun**

Aktor yang paling berperan penting dalam pelaksanaan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Kolaka adalah Dinas Pendidikan Provinsi (Kendari) dan Dinas Pendidikan Kabupaten Kolaka, satuan pendidikan dasar dan menengah dan masyarakat yang usia 7-18 tahun yang menjadi sasaran dalam pelaksanaan wajib belajar 12 tahun.

###### **4.1.1.1 Dinas Pendidikan**

Pelaksanaan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Kolaka adalah tanggung Dinas Pendidikan Kabupaten Kolaka dan satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Kolaka. Implementasi sebuah kebijakan perlu dilakukan penyampaian informasi mengenai kebijakan yang akan dilakukan kepada pelaksana kebijakan agar setiap pihak yang terlibat memahami tugas dan tanggung jawabnya sehingga dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan kesalahan. Begitupun pada pelaksanaan wajib belajar 12 tahun, Dinas Pendidikan Kabupaten Kolaka mensosialisasikan wajib belajar 12 tahun kepada sekolah dan masyarakat. Hal tersebut didukung oleh hasil wawancara dengan responden:

Pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan melakukan sosialisai ke UPTD, Sekolah, masyarakat, kemudian sekolah mensosialisasikan kepada masyarakat (W/KABID/09/Agustus/2017)

Hal ini didukung oleh wawancara yang menyatakan bahwa:

Ketika kami mensosialisasikan program wajib belajar 12 tahun ini, kami tidak melakukan secara formal akan tetapi kami lakukan ketika ke lapangan atau berkunjung ke daerah-daerah dan kami sampaikan kepada masyarakat

bahwa anak yang usia sekolah yang ada di Kabupaten Kolaka maka harus bersekolah minimal berijazah SMA tanpa di pungut biaya. (W/SEKDIS/09 Agustus/2017)

Kebijakan terbaru pada tahun 2017 yaitu untuk SMA/MA/SMK diambil alih dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Kendari) sehingga untuk mempermudah dalam pelayanan pendidikan pada tingkat SMA maka Pemerintah Povinsi akan mendirikan UPTD di Kabupaten Kota. Akan tetapi meskipun SMA/MA/SMK di kelolah oleh Provinsi, biaya pendidikan dari SD sampai SMA tetap gratis untuk pendaftaran dan sumbangan pembinaan pendidikan (SPP). Hal ini didukung oleh responden yang menyatakan bahwa:

Memang untuk SMA di kelola oleh Provinsi, akan tetapi pendidikan tetap gratis karena ada biaya operasional sekolah. (W/KS/SMA/07/Agustus/2017)

Pada pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun melibatkan berbagai pihak yang saling berkoordinasi. Pihak-pihak yang terlibat yaitu Dinas Pendidikan, UPTD Pendidikan, sekolah, dan masyarakat. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh responden yang mengatakan bahwa:

Koordinasi antara struktur pelaksana dapat berjalan dengan baik, terkadang dari Dinas Pendidikan ke UPTD lalu ke sekolah, akan tetapi untuk sekolah yang jauh maka dapat berkoordinasi dengan UPTD yang ada di daerah tersebut. (W/SEKDIS/09 Agustus 2017)

Hal ini didukung oleh salah satu responden yang menyatakan bahwa:

Ketika Dinas Pendidikan memberikan rekomendasi kepada kami bahwa ada anak yang ingin sekolah di SMA I dengan beberapa kendala maka kami dari pihak sekolah meresponnya dengan baik begitupun sebaliknya ketika ada anak yang tidak lulus di sekolah kami kemudian ingin diikutkan program paket C maka kami merekomendasikan ke Dinas Pendidikan. (W/KS/SMAN/ 07Agustus 2017)

Pemerintah daerah menjamin setiap penduduknya yang berusia 7-18 tahun untuk menempuh pendidikan minimal sampai jenjang yang telah ditetapkan yakni SMA dengan membebaskan biaya pendaftaran. Hal ini sesuai dengan yang di nyatakan oleh responden:

Pemerintah daerah menjamin terlaksananya wajib belajar tanpa dipungut biaya dan memberikan bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat yang tidak mampu. (W/KABID/09 Agustus 2017)

Berdasarkan hasil observasi dan studi dokumen tentang Penjaminan wajib belajar bahwa pemerintah daerah dan satuan pendidikan menjamin

terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya dan memberikan bantuan bagi siswa yang kurang mampu sehingga apabila ada anak yang usia sekolah di kabupaten Kolaka yang putus sekolah atau yang tidak lulus pendidikan dasar dan menengah maka wajib menyelesaikan pendidikannya tanpa di pungut biaya dan mengikuti program paket A, B dan C.

Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan wajib belajar 12 tahun melakukan pengawasan pada satuan pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing. Hal ini sesuai dengan pernyataan responden bahwa:

Memang dalam pelaksanaan wajib belajar 12 tahun ini Dinas Pendidikan melakukan pengawasan di sekolah. Pengawasan sekolah dalam hal ini perangkat-perangkat sekolah dan pengawasan mata pelajaran yaitu mengawasi guru khusus mata pelajaran dan perangkat-perangkatnya misalnya RPP dan lain-lain. (KS/SMP/SMA/Agustus/2017)

Berdasarkan dokumen tentang wajib belajar bahwa pemerintah daerah melaksanakan pengawasan program wajib belajar pada satuan pendidikan di daerah masing-masing. Dinas pendidikan melakukan pengawasan ke sekolah-sekolah sesuai dengan tanggung jawabnya. Pengawasan wajib belajar oleh Dinas Pendidikan terbagi menjadi dua yaitu pengawas binaan dan pengawas mata pelajaran. Pengawas binaan berfungsi untuk mengawasi seluruh perangkat sekolah misalnya sarana dan prasarana, tenaga pendidik dan lain-lain sedangkan pengawas mata pelajaran yaitu mengawasi guru khusus mata pelajaran dan perangkat-perangkat pembelajaran.

Wajib belajar 12 tahun agar terlaksana dengan maksimal maka dibutuhkan dana yang cukup dalam pelaksanaannya. Adapun dana pendidikan di kabupaten Kolaka bersumber dari APBN dan APBD. Hal ini sesuai dengan pernyataan responden yang menyatakan bahwa:

Untuk anggaran pendidikan di Kabupaten Kolaka untuk saat ini belum mencapai 20%, akan tetapi dari anggaran inilah di manfaatkan dengan semaksimal mungkin. (W/KABID/21 Agustus 2017)

Ini sesuai dengan data anggaran pendidikan yang di peroleh dari Neraca Pendidikan kabupaten Kolaka yaitu sebagai berikut:

#### Jumlah Anggaran Pendidikan Kabupaten Kolaka Tahun 2015-2017

Tahun	Jumlah Anggaran
2015	276,6 M
2016	258,7 M
2017	231,2 M

Sumber: *Neraca Pendidikan Kabupaten Kolaka*

Data diatas menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Kolaka sudah menyediakan dana pendidikan untuk menunjang program wajib belajar. Meskipun belum mencapai 20% akan tetapi pemerintah dan satuan pendidikan memanfaatkan semaksimal mungkin dengan cara mengalokasikan dana secara tepat sasaran.

Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang usia sekolah semakin meningkat di Kabupaten Kolaka menyebabkan keterbatasan sarana prasaran yang tersedia. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Kolaka melakukan pembangunan sekolah dan penambahan sarana prasarana sampai ke daerah-daerah. Hal ini didukung oleh responden yang menyatakan bahwa:

Kita menyadari bahwa pertumbuhan penduduk yang usia sekolah di Kabupaten Kolaka semakin meningkat olehnya itu kami sebagai Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan melakukan pembangunan-pembangunan sekolah ke berbagai daerah akan tetapi kami menyadari bahwa belum secara merata. (W/KABID/21 Agustus 2017).

Sesuai dengan Data Yang Diperoleh Dari Data Pokok Pendidikan Dasar Dan Menengah bahwa jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Kolaka yang terdata sampai pada tahun 2017 adalah untuk jenjang SD:182 sekolah, SMP:52 sekolah dan SMA/SMK:26 sekolah. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah serius dalam melaksanakan program wajib belajar 12 tahun dan apabila masih ada sekolah yang kekurangan sarana prasarana maka sekolah dapat menambah sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan sekolah.

Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi yang dilakukan di SD, SMP dan SMA yang menjadi objek penelitian bahwa sarana dan prsarana sudah lebih dari pada cukup untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar, akan tetapi tidak terlepas juga dari pada kekurangan-kekurangan.

Implementasi kebijakan wajar 12 tahun, pendidik dan tenaga kependidikan merupakan implementor yang sangat penting. Oleh karena itu yang menjadi perhatian pada tenaga pendidik yaitu pada kualifikasi akademik, kompetensi, jumlah guru dan pemerataan guru. Hal ini didukung oleh responden yang menyatakan bahwa:

Pemerintah daerah mempunyai misi tentang pengembangan pendidikan Kabupaten Kolaka. Implementasi dari misi tersebut adalah meningkatkan kualifikasi guru melalui sertifikasi dan kompetensi guru, pengadaan guru kontrak untuk di daerah-daerah. Sementara guru yang belum memenuhi kualifikasi maka pemerintah memberikan kebijakan yaitu melanjutkan sekolah untuk guru dengan biaya pemerintah atau dengan biaya sendiri. (W/SEKDIS/21 Agustus 2017).

Sesuai dengan data guru yang diperoleh dari Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2017 bahwa jumlah tenaga pendidik yang ada di kabupaten Kolaka yaitu untuk SD: 2.416 orang, SMP: 775 orang, SMA: 345 orang dan SMK: 384 orang. Akan tetapi bagi sekolah yang masih kekurangan guru maka dapat merekrut guru honorer sesuai dengan kebutuhan sekolah.

#### **4.1.1.2 Satuan Pendidikan**

Pelaksanaan wajib belajar pada satuan pendidikan adalah tanggung jawab pimpinan sekolah. Sekolah menerima peserta didik dari lingkungan sekolah sesuai dengan daya tampung serta melaksanakan wajib belajar yang bermutu dan memenuhi standar nasional pendidikan. Hal ini sesuai dengan pernyataan responden bahwa:

Dalam pelaksanaan wajib belajar 12 tahun pada satuan pendidikan maka sekolah dalam penerimaan siswa baru hanya menerima peserta didik sesuai dengan aturan yang ada dan lebih memprioritaskan anak yang umurnya sudah masuk 7 tahun dan yang berdomisili di wilayah sekolah dan sesuai dengan daya tampung sekolah. (W/KS/SD/08 Agustus 2017)

Hal ini didukung dengan pernyataan responden bahwa:

Masyarakat yang datang mendaftar di sekolah kami maka kami terima sesuai dengan aturan penerimaan siswa baru dan kami lebih memprioritaskan pendaftar yang ada di wilayah sekolah tanpa memungut biaya pendaftaran dan SPP. (W/KS/SMP)

Berdasarkan dokumen tentang pedoman penerimaan peserta didik bahwa pada satuan pendidikan wajib menerima peserta didik dari lingkungan sekitarnya tanpa diskriminasi sesuai dengan daya tampung satuan pendidikan yang

bersangkutan dan diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal atau jenis yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan wajib belajar 12 tahun pada satuan pendidikan, sekolah wajib menerima peserta didik sesuai dengan zona atau wilayah sekolah tanpa diskriminasi dan sesuai dengan aturan yang ada dan diselenggarakan melalui pendidikan formal, non formal dan informal.

Implementasi wajib belajar 12 tahun agar terlaksana dengan maksimal maka dibutuhkan dana untuk menunjang terlaksananya wajib belajar 12 tahun. Satuan pendidikan bertanggungjawab dalam pengalokasian dana pendidikan secara efektif dan efisien. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara oleh responden sebagai berikut:

Dalam pengelolaan dana sekolah maka harus sesuai dengan kebutuhan sekolah dan sesuai dengan porsinya masing-masing sehingga dana sekolah dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan sekolah misalnya dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler dan lain-lain. (KS/SD/SMP/SMA/Agustus/2017)

Berdasarkan hasil observasi di Sekolah yang menjadi objek penelitian yaitu SDN 2 Lamokato, SMPN 2 Kolaka dan SMAN I Kolaka, bahwa sekolah ikut aktif dalam pelaksanaan kebijakan wajib belajar 12 tahun dan tidak memungut biaya pendidikan karena sudah ada dana bantuan dari pemerintah seperti dana BOS, PIP dan bantuan buku dan lain-lain. Hal ini sesuai dengan pernyataan responden:

Dalam pelaksanaan kebijakan wajib belajar 12 tahun ini sebagai kepala sekolah sangat mendukung penuh dan melaksanakan kebijakan ini dan menggratiskan biaya pendidikan kecuali baju olahraga dan baju batik. (W/KS/SD/SMP/SMA/Agustus/2017)

Sesuai dokumen tentang sistem pendidikan daerah di Kabupaten Kolaka bahwa pemerintah daerah berkewajiban menyediakan dana guna menuntaskan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan wajib belajar 12 tahun pada satuan pendidikan di Kabupaten Kolaka tidak dipungut biaya karena sudah di tanggung oleh pemerintah dan sekolah juga memiliki dana BOS sehingga semua keperluan siswa di tanggung oleh sekolah kecuali baju olahraga dan magang.

Selain dana pendidikan, satuan pendidikan menyediakan sarana dan prasaran yang cukup dalam pelaksanaan wajib belajar 12 tahun. Satuan



pendidikan mendayagunakan semua sarana dan prasarana yang ada disekolah. Hal ini sesuai dengan pernyataan responden sebagai berikut:

Sarana dan parasarana yang ada disekolah kami gunakan semaksimal mungkin untuk menunjang pelaksanaan proses pembelajaran demi tercapainya tujuan pendidikan dan melakukan pemeliharaan agar sarana dan prasarana yang ada di sekolah tetap dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan kapan pun. (KS/SD/SMP/SMA/2017)

Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi yang dilakukan di SD, SMP dan SMA yang menjadi objek penelitian bahwa sarana dan prasarana sudah cukup untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar, akan tetapi tidak terlepas juga dari pada kekurangan-kekurangan.

Selanjutnya, pada implementasi wajib belajar 12 satuan pendidikan bertanggung jawab dalam mengelola tenaga pendidik dan kependidikan. Satuan pendidikan menempatkan guru sesuai dengan disiplin ilmunya dan melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap guru melalui berbagai kegiatan baik yang di selenggarakan oleh pihak sekolah maupun pemerintah dengan tujuan meningkatkan kompetensi dan angka kredit untuk menaikkan pangkat sehingga dapat meningkatkan kualitas mutu pendidikan. Hal ini sesuai dengan pernyataan responden yang menyatakan bahwa:

Peran kepala sekolah dalam mengelola tenaga pendidik yaitu menempatkan sesuai dengan keilmuannya dan mengetahui apa yang menjadi kekurangan kemudian diikutkan dalam pelatihan untuk menunjang profesinya sebagai guru seperti mengikuti program KKG, MGMP dan lain-lain. (KS/SD/SMP/SMA).

Adapun tenaga pendidik di sekolah yang menjadi objek penelitian ini sudah sesuai dengan kebutuhan sekolah, dan mengajar sesuai dengan disiplin ilmunya. Sedangkan untuk kualifikasi, semuanya sudah berkualifikasi SI dan ada beberapa guru yang S2. Hal ini di dukung oleh hasil wawancara dengan responden:

Guru di sekolah kami ini sudah sesuai dengan kebutuhan sekolah untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar dan semuanya sudah berkualifikasi SI dan S2 dan sekarang ada beberapa guru yang sedang melanjutkan pendidikannya untuk S2. Kalaupun kedepannya kami mengalami kekurangan guru maka kami akan merekrut guru honorer sesuai dengan yang kami butuhkan. (WKS/SD/SMP/SMA).

#### 4.1.2 Program

Program wajib belajar 12 tahun di kabupaten Kolaka bertujuan untuk meningkatkan akses pelayanan pendidikan. Salah satu program yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kolaka untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar 12 tahun adalah program pendidikan gratis dalam hal ini sekolah membebaskan biaya pendaftaran dan SPP serta pungutan-pungutan lainnya.

Dinas pendidikan dan satuan pendidikan memanfaatkan semaksimal mungkin anggaran dari APBN dan APBD untuk memastikan pembiayaan pendidikan gratis dan terjangkau mulai pada jenjang sekolah dasar sampai pada jenjang menengah atas. Hal ini sesuai dengan pernyataan responden yang menyatakan bahwa:

Untuk pendidikan di Kabupaten Kolaka ini diselenggarakan secara gratis dalam artian bahwa sekolah tidak diperkenankan untuk memungut biaya pendaftaran atau uang komite pada siswa kecuali pada kebutuhan-kebutuhan tertentu misalnya baju olahraga dan lain-lain sedangkan siswa yang kurang mampu maka diberi bantuan baik dari pemerintah daerah maupun dari sekolah. (W/KABID/21 Agustus 2017)

Berdasarkan observasi di Sekolah yang menjadi objek penelitian yaitu SDN 2 Lamokato, SMPN 2 Kolaka dan SMAN I Kolaka, bahwa sekolah ikut aktif dalam pelaksanaan kebijakan wajib belajar 12 tahun dan tidak memungut biaya pendidikan karena sudah ada dana bantuan dari pemerintah seperti dana BOS, PIP, serta bantuan buku dan lain-lain. Hal ini sesuai dengan pernyataan responden:

Kami tidak memungut biaya kepada siswa kecuali baju olahraga, baju batik dan biaya untuk magang pada jenjang SMA. (W/KS/SD/SMP/SMA/Agustus/2017)

Sesuai dokumen tentang sistem pendidikan daerah di Kabupaten Kolaka bahwa pemerintah daerah berkewajiban menyediakan dana guna menuntaskan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun dan memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu.

Selain membebaskan biaya pendaftaran dan SPP, pemerintah mendirikan SMP terbuka dan SMP atap guna memudahkan akses bagi siswa yang rumahnya jauh dari sekolah. Hal ini sesuai dengan pernyataan responden yang menyatakan bahwa”

Kami mendirikan SMP terbuka dan ada juga SMP atap di daerah-daerah untuk memudahkan siswa bagi yang rumahnya jauh dari sekolah dan bagi siswa yang tidak memiliki kendaraan sehingga dengan adanya SMP tersebut diharapkan masyarakat usia sekolah dapat menempuh pendidikan. (W/SEKDIS/09/Agustus/2017)

Pernyataan diatas dapat dipahami bahwa salah satu upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan untuk melaksanakan wajib belajar 12 tahun adalah mendirikan SMP atap dan SMP terbuka. Ini membuktikan bahwa pemerintah serius dalam melaksanakan program wajib belajar 12 tahun ditandai dengan adanya program-program yang dilaksanakan sebagai penunjang dalam pelaksanaan wajib belajar 12 tahun ini.

#### 4.1.3 Sasaran Wajib Belajar 12 Tahun

Pelaksanaan Program wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Kolaka tentu sangat menarik minat masyarakat usia sekolah untuk melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang SMA. Adapun yang menjadi sasaran program wajib belajar 12 tahun adalah masyarakat yang usia 7-18 tahun yang ada di Kabupaten Kolaka. Hal ini sesuai dengan pernyataan responden:

Sasaran dari pelaksanaan wajib belajar 12 tahun ini adalah anak yang berusia 7-18 tahun artinya anak yang usia tersebut wajib mengikuti pendidikan, akan tetapi bagi anak yang umurnya sudah melebihi dari ketentuan yang ada maka disarankan untuk mengikuti program paket A, B dan C. (W/KABID/21/Agustus/2017)

Untuk mengukur keberhasilan yang menjadi sasaran dari program wajib belajar 12 tahun dapat diketahui melalui APK dan APM. Angka partisipasi kasar merupakan indikator utama untuk mengukur ketuntasan wajib belajar 12 tahun. Berikut data APK dan APM Kabupaten Kolaka:

Tabel 4.1 APM dan APK Kabupaten Kolaka

Jenjang Pendidikan	2014		2015		2016	
	APM	APK	APM	APK	APM	APK
SD/MI	91,51%	110,50 %	85,79%	99,00%	85,79%	99,88%
SMP/MTs	69,43%	89,34%	76,81%	97,01%	87,02%	97,51%
SMA/SMK/MA	55,28%	82,27%	73,97%	95,72%	71,65%	95,97%

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Kolaka

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa angka partisipasi aksar (APK) wajib belajar 12 tahun untuk jenjang SD sampai SMA sudah melebihi dari target yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang terdapat di dalam RPJMD Kabupaten Kolaka tahun 2014-2019. Hal ini menunjukkan bahwa program wajib belajar 12 tahun dapat dikatakan tuntas meskipun masih terdapat kekurangan-kekurangan.

Sedangkan untuk angka partisipasi murni (APM) Kabupaten Kolaka masih ada yang belum mencapai target yang telah ditentukan oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan pernyataan responden:

Untuk angka partisipasi Murni Di kabupaten Kolaka ini ada yang sudah mencapai target dan ada yang belum, adapun yang menjadi penyebabnya sehingga anak putus sekolah diantaranya adalah faktor individu (pengaruh lingkungan) dan kebutuhan ekonomi terutama anak yang rumahnya jauh dari sekolah. (W/SEKDIS/21 Agustus 2017)

Hal ini juga dibenarkan oleh salah satu responden yang menyatakan bahwa:

Sebenarnya yang menjadi hambatan untuk anak-anak sehingga tidak melanjutkan pendidikan adalah individu anak itu sendiri dalam hal ini pengaruh kenakalan remaja apalagi ketika anak berteman dengan anak yang tidak sekolah maka anak lebih cenderung akan mengikuti temannya dan sebagian juga lebih memilih untuk bekerja dengan alasan bisa langsung menghasilkan uang. (W/ORTU SISWA/09 September 2017)

Terlepas dari meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) di Kabupaten Kolaka masih terdapat angka putus sekolah. Hal ini didukung dengan data dokumen angka putus sekolah yang di peroleh dari Dinas Kabupaten Kolaka sebagai berikut:

Tabel 4.2 Angka Putus Sekolah Kabupaten Kolaka 2016/2017

<b>Jenjang Pendidikan</b>	<b>Jumlah Anak Putus Sekolah</b>
<b>SD</b>	45 orang
<b>SMP</b>	264 orang
<b>SMA</b>	725 orang

(Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Kolaka)

Berdasarkan tabel 4.2 masih terdapat angka putus sekolah di setiap jenjang dan yang paling tinggi yaitu pada jenjang SMA. Adapun yang menjadi

penyebabnya adalah faktor ekonomi dan individu itu sendiri. Hal ini sesuai dengan pernyataan responden yang menyatakan bahwa:

Masih terdapat anak yang putus sekolah di Kabupaten Kolaka dan yang paling tinggi itu terdapat pada jenjang SMA, adapun penyebabnya adalah individu itu sendiri yang memang tidak ingin sekolah. (W/SEKDIS/21/Agustus/2017)

#### **4.2 Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun**

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terdapat berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Kolaka. Adapun kendala-kendala tersebut yaitu; a) minimnya anggaran; b) sistem zonasi; c) kurangnya perhatian orang tua terhadap pendidikan dan kurangnya minat anak untuk sekolah; d) keadaan ekonomi; e) sarana dan prasarana ; f) kekurangan guru terutama pada daerah terpencil; dan g) sistem zonasi. Hal ini sesuai dengan pernyataan responden bahwa:

Hambatan yang kami hadapi dalam pelaksanaan wajar ini adalah keterbatasan anggaran, sistem zonasi dan minimnya pemahaman orang tua terhadap pendidikan dan kurangnya minat anak untuk sekolah dan belum meratanya guru sampai pada daerah terpencil. (W/SEKDIS/21 Agustus 2017)

Berdasarkan pernyataan di atas menunjukkan bahwa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di kabupaten kolaka adalah minimnya anggaran sehingga dapat mempengaruhi terhadap pelayanan pendidikan dan sistem zonasi yang mengharuskan sekolah untuk menerima peserta didik yang dekat dengan sekolah. Hal ini sesuai dengan pernyataan responden yang menyatakan bahwa:

Dengan diterapkannya sistem zonasi ini dapat menjadi kendala karena masih ada sekolah yang ruang kelasnya masih terbatas sehingga dalam penerimaan siswa baru di batasi sedangkan dilain pihak sekolah diharuskan untuk menerima peserta didik yang berada di wilayah sekolah tersebut. (W/KS/SD/ 08 Agustus 2017)

Adapun masalah selanjutnya yaitu kurangnya pemahaman orang tua terhadap pendidikan yang menyebabkan anak lebih memilih bekerja dibandingkan sekolah. Hal ini sesuai dengan pernyataan responden sebagai berikut:

Kendala kami sebagai orang tua adalah individu anak itu sendiri yang tidak ingin sekolah atau karena banyaknya pelanggaran yang dilakukan disekolah

yang menyebabkan malu kepada teman-temannya yang akhirnya memilih berhenti sekolah. (W/ORTU SISWA/09/September 2017).

Penjelasan responden tersebut menegaskan bahwa sebenarnya yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun ini adalah faktor eksternal atau faktor lingkungan. Lingkungan memberikan pengaruh yang sangat besar kepada anak, terutama anak yang belum memahami pentingnya pendidikan dan ketika siswa banyak melakukan pelanggaran di sekolahnya yang menyebabkan anak berhenti sekolah. Hal ini diperkuat oleh responden yang menyatakan bahwa:

Yang menyebabkan saya putus sekolah adalah karena banyak pelanggaran di sekolah sehingga saya malu kepada teman-teman lainnya. (W/Siswa/10/September/2017).

Masalah selanjutnya adalah ekonomi lemah terutama bagi anak yang rumahnya jauh dari sekolah dan tidak memiliki kendaraan sehingga anak yang kurang mampu lebih memilih untuk bekerja. Meskipun pendidikan di Kabupaten Kolaka dilaksanakan secara yaitu pembebasan biaya pendaftaran dan uang komite akan tetapi siswa masih punya tanggungan yaitu baju olahraga dan kebutuhan-kebutuhan mendesak lainnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan responden bahwa:

Yang menjadi kendala kami sebagai orang tua adalah keadaan ekonomi sehingga biaya untuk kebutuhan sekolah itu kurang yang menyebabkan anak memilih untuk bekerja sambil menunggu untuk mengikuti paket. (W/ORTU SISWA/09/September 2017)

Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi oleh sekolah yang menjadi objek penelitian di SDN 2 Lamokato Kolaka, SMPN 2 Kolaka dan SMAN 1 Kolaka yaitu masih kekurangan sarana dan prasarana berupa ruang kelas, laboratorium dan komputer. Hal ini sesuai dengan pernyataan responden:

Yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan wajib belajar 12 tahun di SD 2 Lamokato ini adalah kekurangan ruang kelas, sehingga dalam penerimaan siswa baru kami batasi dan belum adanya Lab komputer. (W/KS/SD/ 22 Agustus 2017)

Hal ini juga dipertegas oleh responden yang menyatakan bahwa:

Untuk sementara kendala kami adalah kurangnya komputer sehingga ketika pelaksanaan UNBK maka kami akan menyewa komputer. (W/KS/SMP/SMA/Agustus/2017)

Pernyataan di atas menegaskan bahwa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan wajib belajar 12 tahun yaitu kekurangan sarana dan prasarana berupa ruang kelas, laboratorium komputer dan komputer. Sarana dan prasarana sangat dibutuhkan untuk pelaksanaan wajib belajar karena tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai maka proses pembelajaran tidak terlaksana secara maksimal.

Hal ini sesuai dengan hasil observasi dan dokumentasi yang dilakukan di SMP 2 Kolaka dan SMAN I Kolaka bahwa terdapat komputer yang sudah tidak layak pakai sehingga sekolah harus menyewa komputer untuk pelaksanaan UNBK.

#### **4.3 Upaya Yang Dilakukan untuk Mengatasi Permasalahan Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun**

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan maka dilakukanlah upaya-upaya yang meliputi:

Pertama, Dinas Pendidikan Kabupaten Kolaka dalam mengelola anggaran memprioritaskan kebutuhan yang penting dan mendesak sehingga anggaran yang ada dapat dialokasikan sesuai dengan kebutuhan. Hal ini sesuai dengan pernyataan responden:

Dengan keterbatasan anggaran maka pengalokasian anggaran harus tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan dan dikelola dengan baik sehingga apa yang dibutuhkan untuk pelayanan pendidikan dapat terpenuhi. (W/SEKDIS/21/Agustus/2017)

Kedua, sekolah menerima peserta didik sesuai sistem zonasi dan sesuai dengan daya tampung sekolah dan peserta didik boleh mendaftar di luar wilayah zonasi dikarenakan jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Kolaka belum merata. Hal ini sesuai dengan pernyataan responden yang menyatakan bahwa:

Untuk sementara sekolah boleh menerima peserta didik di luar wilayah zonasi dan sesuai dengan daya tampung sekolah karena pembangunan sekolah belum merata. (W/SEKDIS/21 Agustus 2017).

Ketiga, Dinas Pendidikan dan sekolah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pendidikan dan melibatkan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah seperti perayaan hari kemerdekaan dan lain-lain. Hal ini sesuai dengan pernyataan responden bahwa:



Bentuk sosialisasi yang dilakukan tidak secara formal namun saat melakukan kunjungan ke lapangan maka disampaikan kepada masyarakat mengenai pentingnya pendidikan untuk masa depan anak-anak dan melibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah sekitar. (W/SEKDIS/09/Agustus 2017)

Keempat, pemerintah dan sekolah melakukan sosialisai kepada masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam pendidikan tanpa dipungut biaya dan memberikan beasiswa kepada masyarakat yang kurang mampu. Sedangkan bagi siswa yang putus sekolah maka dianjurkan untuk mengikuti pendidikan tanpa dipungut biaya dan siswa yang umurnya melebihi dari standar yang ditetapkan maka dianjurkan untuk mengikuti paket A, B dan C yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan.. Hal ini sesuai dengan pernyataan responden:

Pemerintah dan satuan pendidikan melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar dapat menempuh pendidikan tanpa dipungut biaya dan memberikan bantuan kepada siswa yang kurang mampu berupa uang, seragam sekolah dan lain-lain. Sedangkan siswa yang putus sekolah maka dianjurkan untuk mengikuti paket A, B dan C. (W/KABID/09/Agustus/2017)

Kelima, bagi sekolah yang kekurangan sarana dan prasarana misalnya kekurangan ruang kelas, laboratorium komputer dan komputer maka sekolah mengajukan proposal permohonan kepada pemerintah daerah maupun pusat. Hal ini sesuai dengan pernyataan responden yang menyatakan bahwa:

Sekolah sudah mengajukan proposal pengadaan penambahan ruang kelas baru, laboratorium dan pengadaan computer (W/KS/SD/SMP)

Keenam, yang dilakukan Dinas Pendidikan adalah mengangkat guru kontrak untuk di tempatkan di daerah-daerah tertentu. Hal ini sesuai dengan pernyataan responden bahwa:

Untuk sekarang yang dilakukan oleh Pemerintah adalah mengangkat guru kontrak dan melakukan pembangunan-pembangunan sekolah baru di daerah terpencil dan mendirikan SMP terbuka. (W/SEKDIS/21 Agustus 2017)

## **5. PEMBAHASAN**

### **5.1 Implementasi Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Kolaka**

Implementasi kebijakan adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang bertujuan melaksanakan keputusan pemerintah atau keputusan legislasi negara yang telah dibuat atau dirumuskan sebelumnya (Rawita, 2010). Program wajib belajar 12 tahun Di Kabupaten Kolaka sudah di implementasikan. Wajib belajar

12 tahun di Kabupaten Kolaka mengacu pada Peraturan Daerah Tentang Sistem Pendidikan Daerah bahwa warga masyarakat yang berusia 7-18 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dan menengah sampai tamat (Peraturan daerah no 3 tahun 2013 Tentang Sistem Pendidikan Daerah).

(Tachjan, 2006) menjelaskan bahwa ada enam unsur yang mutlak harus ada dalam implementasi sebuah kebijakan yaitu:

Pertama adalah unsur pelaksana. Pelaksanaan kebijakan merupakan pihak-pihak yang menjalankan baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut. Implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Kolaka adalah tanggung jawab Dinas Kabupaten Kolaka dan satuan pendidikan.

Dalam pelaksanaan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Kolaka Dinas Pendidikan bertanggungjawab dalam mengontrol sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Kolaka dan menyediakan anggaran bagi satuan pendidikan dan memfasilitasi satuan pendidikan berupa sarana dan prasarana, tenaga pendidik bagi sekolah yang membutuhkan.

Implementasi sebuah kebijakan agar dapat terlaksana dengan baik maka para pelaksana kebijakan hendaknya melakukan penyampaian informasi atau sosialisasi kepada masyarakat yang menjadi sasaran dari kebijakan tersebut. Pelaksana kebijakan harus mengetahui apa yang hendak dilakukan dan menyampaikan informasi kepada sasaran dari kebijakan tersebut (Subarsono, 2005). Hal ini sesuai dengan hasil wawancara menyatakan bahwa pemerintah Kabupaten Kolaka sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat kabupaten Kolaka bahwa masyarakat yang usia sekolah di Kabupaten Kolaka wajib mengikuti Pendidikan sampai pada jenjang SMA tanpa dipungut biaya.

Pelaksanaan wajib belajar melibatkan berbagai pihak. Pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi wajib belajar 12 tahun ini adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kolaka, UPTD Pendidikan, sekolah dan masyarakat. Sehingga dalam pelaksanaannya dinas pendidikan melakukan koordinasi dengan UPTD Pendidikan dan sekolah.

Dinas pendidikan Kabupaten Kolaka melakukan pengawasan kepada satuan pendidikan sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing. Pengawasan pada

satuan Pendidikan di Kabupaten Kolaka terbagi menjadi dua yaitu pengawas binanaan dan pengawas mata pelajaran. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang menyatakan bahwa Dinas Pendidikan melakukan pengawasan kepada sekolah-sekolah seperti mengawasi perangkat sekolah misalnya sarana dan prasarana, tenaga pendidik dan lain-lain. Sedangkan pengawas mata pelajaran yaitu mengawasi guru mata pelajaran dan perangkat-perangkat pembelajaran seperti RPP dan lain-lain.

Selain melakukan pengawasan Dinas pendidikan menyediakan anggaran pendidikan yang bersumber dari APBN dan APBD, memfasilitasi satuan pendidikan berupa sarana dan prasarana, tenaga pendidik dan lain-lain. Hal ini sesuai dengan pernyataan responden yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan wajib belajar 12 tahun maka Dinas pendidikan bertanggungjawab dalam memfasilitasi sekolah untuk menunjang terlaksananya wajib belajar 12 tahun.

Kedua yaitu adanya program yang dilaksanakan. Kebijakan publik tidak mempunyai arti penting tanpa adanya tindakan nyata yang dilakukan dengan berbagai program atau kegiatan. Salah satu program yang dilakukan dalam pelaksanaan wajib belajar 12 tahun adalah membebaskan biaya pendaftaran dan SPP serta pungutan-pungutan lainnya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan responden yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Kolaka yaitu membebaskan biaya pendidikan berupa uang pendaftaran dan uang komite.

Ketiga adalah kelompok sasaran. Kelompok sasaran yaitu sekelompok orang atau organisasi yang akan menerima barang atau jasa yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan. Sasaran wajib belajar 12 tahun adalah masyarakat yang usia 7-18 tahun yang ada di Kabupaten Kolaka. Adapun anak yang usianya sudah melewati batas usia sekolah maka disarankan untuk mengikuti program paket yaitu Paket A, B dan C yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan.

Sesuai dengan hasil wawancara mengenai wajib belajar 12 tahun bahwa program tersebut mendapat respon positif dari masyarakat kabupaten Kolaka di tandai dengan meningkatnya angka partisipasi kasar selama peraturan di terapkan.

## **5.2 Kendala Yang Dihadapai Pada Implementasi Wajib Belajar 12 Tahun Di Kabupaten Kolaka**

Van Meter dan van Horn mengemukakan ada enam (6) variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan, yakni:

Pertama yaitu standart dan sasaran kebijakan. Setiap kebijakan publik harus mempunyai standar dan sasaran kebijakan jelas dan terukur sehingga dengan ketentuan tersebut tujuannya dapat terwujudkan. Dalam standar dan sasaran kebijakan tidak jelas, dapat terjadi multi-interpretasi dan mudah menimbulkan kesalahpahaman dan konflik di antara para agen implementasi. Oleh karena itu Dinas Pendidikan Kabupaten Kolaka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab harus sesuai dengan peraturan yang ada dan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Akan tetapi untuk saat ini sekolah belum mempunyai SOP mengenai kebijakan wajib belajar 12 tahun.

Kedua yaitu sumber daya. Sumber daya manusia Dinas Pendidikan sudah mencukupi dalam pelaksanaan kebijakan wajib belajar 12 tahun dan bekerja sesuai dengan tugas masing-masing. Sedangkan sumber daya manusia di tingkat sekolah masih mengalami kekurangan dalam hal tenaga pengajar sehingga pemerintah mengangkat guru kontrak untuk di tempatkan pada sekolah yang kekurangan guru terutama pada daerah terpencil . Adapun jumlah guru yang ada di Kabupaten Kolaka pada tahun 2017 yaitu SD: 2.416 guru; SMP: 775 orang dan SMA/SMK: 729

Pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di kabupaten kolaka jumlah guru masih belum mencukupi terutama pada daerah terpencil, sehingga dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan wajib belajar. Hal tersebut sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sunarno, 2013) tentang *Studi Implementasi Kebijakan Pendidikan Sekolah Gratis Program Wajib Belajar 9 Tahun* yang menunjukkan bahwa masih terdapat masalah dalam implementasi wajib belajar 9 tahun antara lain kurangnya sosialisasi, sarana dan prasarana yang kurang memadai, kurangnya pemerataan guru dan peningkatan kualitas guru dan pendanaan yang masih kurang.

Selain sumber daya manusia, diperlukan dana dalam melaksanakan program wajib belajar yang bersumber dari APBN dan APBD. Pelaksanaan wajib belajar

12 tahun masih terdapat kendala yang dihadapi misalnya minimnya anggaran pendidikan. Hal ini sesuai dengan pendapat Nanang fattah (Arif, 2014) bahwa kurangnya kualitas pendidikan di Indonesai disebabkan oleh kurangnya anggaran pendidikan. Keterbatasan dana akan berpengaruh terhadap pelayanan pendidikan seperti masih kurangnya sarana dan parasarana bagi sekolah.

Sarana dan prasarana merupakan fasilitas yang mendukung untuk kelancaran program wajib belajar 12 tahun. akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala yang dihadapi misalnya kekurangan ruang kelas, belum adanya laboratorium komputer dan komputer yang tidak layak pakai dan lain-lain. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan kepada pihak yang terlibat bahwa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan wajib belajar adalah masih kurang sarana dan prasarana misalnya masih kurangnya ruangan kelas, laboratorium dan peralatan lainnya misalnya computer untuk pelaksanaan UNBK sehingga sekolah dalam melaksanakan UNBK sekolah merental computer.

Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Siolito, Suryaningsih, Suwitri, Subowo, & Publik, n.d 2016.) mengenai *Implementasi Kebijakan Pendidikan Menengah Universal Di Kota Semarang* menunjukkan bahwa yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun adalah kekurangan tenaga pengajar, pengelolaan dana yang kurang baik, sumber daya fisik berupa sarana dan prasarana di tingkat sekolah masih kurang.

Hal lain yang menjadi kendala dalam wajib belajar ini adalah sistem zonasi. Dengan adanya sistem zonasi maka sekolah wajib menerima peserta didik di wilayah sekolah, akan tetapi di Kabupaten Kolaka belum sepenuhnya menerapkan kebijakan tersebut karena jumlah sekolah masih belum merata. Hal ini sesuai dengan pernyataan responden bahwa sistem zonasi belum diterapkan secara total karena keterbatasan daya tampung sekolah yang ada sehingga peserta didik boleh mendaftar di luar wilayah zonasi.

Ketiga yaitu karakteristik agen pelaksana. Sekolah sebagai lembaga pendidikan Pemerintah yang bertugas untuk melaksanakan program wajib belajar 12 tahun, mendapat perintah langsung dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kolaka setiap tindak tanduk sekolah saat melaksanakan program wajib belajar 12 tahun atas arahan Dinas Pendidikan. Akan tetapi dalam pelaksanaan wajib belajar 12

tahun di Kabupaten Kolaka belum mempunyai buku pedoman dalam pelaksanaannya sehingga dalam pelaksanaannya sekolah hanya mengikuti arahan dari dinas pendidikan.

Keempat yaitu disposisi (sikap dan kecenderungan para pelaksana). Berdasarkan hasil observasi, implemenor baik sekolah maupun masyarakat mempunyai disposisi yang baik. Sekolah melaksanakan wajib belajar 12 tahun tanpa meungut biaya, menerima peserta didik sesuai dengan daya tampung serta mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Program wajib belajar 12 tahun sebagai implementasi dari visi misi Bupati Kolaka pada bidang pendidikan yaitu perluasan akses dan pemeratan pendidikan. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan kepada salah satu responden bahwa sama sekali tidak keberatan dengan kebijakan tersebut bahkan sangat senang dengan adanya program ini karena dengan program ini sumber daya manusia menjadi lebih berkualitas.

Kelima yaitu komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana. Dalam melaksanakan komunikasi mengenai pelaksanaan wajib belajar 12 tahun pihak dinas Pendidikan Kabupaten Kolaka melakukan pertemuan dengan kepala sekolah. Selanjutnya Dinas pendidikan melakukan koordinasi dan komunikasi pada pihak-pihak yang terlibat seperti UPTD pendidikan, satuan Pendidikan dan masyarakat sebagai sasaran dari kebijakan wajib belajar 12 tahun.

Adapun yang paling trakhir yaitu kondisi sosial, ekonomi dan politik. Kondisi ekonomi orang tua sangat berpengaruh terhadap partisipasi orang tua dalam menyekolahkan anaknya, meskipun pemerintah sudah membebaskan biaya pendidikan pada jenjang SD, SMP dan SMA tetapi masih terdapat masyarakat yang putus sekolah disebabkan karena kurang mampu dari segi ekonomi sehingga anak lebih memilih untuk bekerja. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Zaili Rusli, 2017) tentang *Pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun Di Kota Pekanbaru* menunjukkan bahwa masih terdapat masalah dalam pelaksanaan wajib belajar antara lain adalah ekonomi masyarakat, anggaran dan sarana dan prasarana masih kurang.

Selanjutnya yaitu kondisi sosial, status sosial orang tua dan pendidikan orang tua sangat mempengaruhi terhadap pendidikan anaknya. Sehingga ada beberapa anak yang putus sekolah disebabkan dengan kondisi sosial atau

lingkungan yang dapat mempengaruhi anak. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Bagi et al., n.d.2016) *Mengenai Implementasi Hak Pendidikan Anak Dikaitkan Dengan Wajib Belajar 9 Tahun* menunjukkan bahwa tidak terimplementasinya dengan baik dikarenakan faktor lingkungan, faktor keluarga, faktor ekonomi, faktor tingkat pendidikan keluarga yang rendah dan faktor kemauan pada diri anak itu sendiri. Terakhir adalah kondisi politik dimana Program wajib belajar 12 ini merupakan implementasi dari visi misi Bupati Kabupaten Kolaka dalam hal peningkatan pelayanan pendidikan.

### **5.3 Upaya Terhadap Kendala dalam Implementasi Kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Kolaka**

Pencapaian sasaran program wajib belajar 9 tahun, pemerintah telah menyusun strategi, antara lain meningkatkan jumlah dan daya tampung SLTP, mengangkat guru baru, menyediakan lebih banyak sarana belajar, mengajukan anggaran yang lebih besar untuk pendidikan, membebaskan uang sekolah dan mensubsidi sekolah swasta (Prayitno Didi, 2008).

Selanjutnya (Ulfatin, Mukhadis, & Imron, n.d., 2010) ada banyak alternatif yang bisa ditawarkan untuk mengatasi penuntasan wajib belajar 9 tahun di antaranya adalah (1) mendirikan sekolah (SMP) berasrama, (2) mendirikan (menambah) SMP baru, (3) perluasan SD-SMP satu atap, dan (4) mengefektifkan Kejar Paket B. Hal ini sama dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan Kabupaten Kolaka. Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas pendidikan dan satuan pendidikan Kabupaten Kolaka adalah sebagai berikut:

Pertama, Dinas pendidikan dalam pengalokasian anggaran harus melihat pada kebutuhan-kebutuhan yang penting dan mendesak agar anggaran yang minim tersebut dapat tersalurkan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan. Disamping itu Dinas Pendidikan mengajukan permohonan penambahan anggaran.

Kedua, sekolah menerima peserta didik di luar wilayah zonasi dengan pertimbangan bahwa jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Kolaka masih kurang.

Ketiga, Pemerintah dan Satuan Pendidikan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pendidikan untuk masa depan anak-anak dan melibatkan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh

pemerintah seperti perayaan hari kemerdekaan dan lain. Hal ini sama dengan yang dilakukan oleh (Berlian, Peneliti, Pada Puslitjaknov, & Kemdiknas, n.d., 2011) *Tentang Faktor-Faktor Yang Terkait Rendahnya Pencapaian Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun* bahwa upaya untuk mengatasi masalah tersebut adalah melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan.

Keempat, Pemerintah dan Satuan Pendidikan melakukan sosialisasi dan mengajak kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pendidikan tanpa dipungut biaya dalam hal ini membebaskan biaya pendaftaran dan uang komite serta memberikan bantuan kepada siswa yang kurang mampu berupa uang maupun seragam sekolah. Hal ini sama dengan yang dilakukan oleh (Nada Nazopah, 2012) tentang Penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun di Kota Mataram, NTB bahwa Beasiswa merupakan pemberian bantuan kepada siswa yang kurang mampu baik yang berasal dari pemerintah pusat.

Kelima, Pemerintah melakukan pembangunan sekolah baru pada daerah terpencil dan mendirikan SMP terbuka dan SMP atap. Sedangkan Satuan Pendidikan yang kekurangan sarana dan prasarana maka mengajukan permohonan pengadaan sarana dan prasarana kepada pemerintah baik pusat maupun daerah.

Keenam, upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan untuk daerah yang kekurangan guru, maka Pemerintah Daerah melakukan pemerataan guru dengan cara mengangkat guru kontrak untuk ditempatkan di daerah dan ini sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka.

## **6. PENUTUP**

### **6.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dinyatakan, maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan wajib belajar 12 (dua belas) tahun di Kabupaten Kolaka adalah tanggung jawab dinas pendidikan dan satuan pendidikan. Adapun program yang dilakukan untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Kolaka adalah membebaskan biaya pendidikan berupa biaya pendaftaran dan SPP, mendirikan SMP terbuka, SMP atap dan program paket A, B dan C. Sasaran dari kebijakan wajib belajar 12 tahun adalah masyarakat yang berusia 7-18 tahun dan adapun anak yang usianya melebihi usia batas sekolah maka disarankan untuk mengikuti pendidikan paket A, B dan C.



2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Kolaka secara umum yaitu: a) minimnya anggaran; b) kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pendidikan dan anak yang kurang minat untuk belajar; c) ekonomi lemah ; d) sarana dan prasarana; dan e) kekurangan guru terutama pada daerah terpencil.
3. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka mnegatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun adalah: a) mengalokasikan dana untuk kebutuhan yang penting dan mendesak; b) melakukan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan dan melibatkan masyarakat dalam kegiatan-kegitana yang diselenggarakan oleh Pemerintah; c) mengajak masyarakat untuk sekolah tanpa dipungut biaya dan memberikan bantuan bagi siswa yang kurang mampu; d) Dinas Pendidikan melakukan pembangunan sekolah baru, mendirikan SMP terbuka dan SMP atap sedangkan sekolah yang kekurangan sarana dan prasarana maka mengajukan permohonan pengadaan sarana dan prasarana; e) dinas pendidikan mengangkat guru kontrak untk daerah terpencil.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun sebaiknya lebih diperhatikan lagi terutama pada daerah-daerah terpencil.
2. Pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun tidak akan bisa berhasil tanpa adanya sarana dan parasarana yang cukup memadai dana yang cukup, oleh karena itu pemerintah diharapkan lebih memprioritaskan lagi dalam hal sarana dan prasaran serta anggaran untuk pendidikan.
3. Pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun tidak akan bisa tercapai dengan maksimal tanpa adanya kerja sama dengan lembaga-lembaga yang terkait, sehingga dibutuhkan keterlibatan dari pemerintah, sekolah dan masyarakat serta unsur-unsur lainnya.
4. Kepada Dinas pendidikan, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi terkait dengan pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun.

## RUJUKAN

- Anti, A., Id, A. C., Zaili, P. H., Sd, R., & Si, M. (2015). Implementasi Program Wajib Belajar 9 Tahun Di Pekanbaru Tahun 2012. *Jom Fisip*, 2(2).
- Arif. (2014). Kebijakan Politik Anggaran Pendidikan Kota Yogyakarta. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan*, 7(2).
- Aulia, S. (2012). Desentralisasi Kebijakan Pendidikan (Studi Tentang Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun Di Kota Surabaya Pada Tingkat Pendidikan Menengah Dan Kejuruan). *Jurnal Politik Muda*, 2(1), 204–216.
- Bagi. (2016). Implementasi Hak Pendidikan Anak Dikaitkan Dengan Wajib Belajar (Wajar) 9 Tahun Bagi Anak Yang Bekerja Di Warung Kopi Pujasera Tridharma Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik.
- Berlian. (2011). Faktor-Faktor Yang Terkait Dengan Rendahnya Pencapaian Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.
- Dinas Pendidikan. (2016). Angka Putus Sekolah. Kabupaten Kolaka.
- Dunn, & William. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fattah, N. (2014). *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Handayani, T. (2012). Menyongsong Kebijakan Pendidikan Menengah Universal: Pembelajaran Dari Implementasi Wajar Dikdas 9 Tahun. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 7(1), 39–56.
- Herisusanto, G., & Radhiah. (2015). Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Di Kecamatan Darul Makmur. *Jurnal Bina Gogik*, 2(2), 57–64.
- Kabupaten Kolaka. (2014). Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sistem Pendidikan Daerah. Kabupaten Kolaka: Kabupaten Kolaka.
- Kusuma. (2015). Implementasi Program Wajib Belajar 12 Tahun Di Provinsi Dki Jakarta (Studi Administrasi Jakarta Timur). *Journal Of Politic And Government Studies*, 4(2).
- Kusuma Wardani Welly. (2015). Implementasi Program Wajib Belajar 12 Tahun Di Provinsi Dki Jakarta (Studi Kota Administrasi Jakarta Timur). *Journal Of Politic And Government Studies*, 4(2), 371–388.
- Moleong, L. J. (2005). *Lexy J. Moleong (Revisi)*. Bandung: R.
- Montolalu, A. A. (2015). *Peran Pemerintah Dalam Mewujudkan Pendidikan Wajib Belajar Di Kecamatan Matuari Kota Bitung*.
- Musyaddad. (2013). Problematika Pendidikan Di Indonesia. *Problematika*

*Pendidikan Di Indonesia, 4.*

- Nazopah. (2012). *Penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun Di Kota Mataram*, Ntb. Universitas Malang.
- Onisimus. (2013). *Manajemen Pendidikan Di Era Otonomi Daerah Konsep, Startegi Dan Implementasi*. Bandung: Alfabeta.
- Prayitno. (2008). *Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah (Studi Kasus Pelaksanaan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun Di Distrik Semangga, Kabupaten Merauke )*. Universitas Diponegoro.
- Putera, R. E. (2010). *Formulasi Kebijakan Anggaran Pendidikan Dalam Mewujudkan Peningkatan Pemerataan Pendidikan Era Otonomi Daerah Di Kabupaten Solok*. *Jurnal Demokrasi*, 9(Nomor 2), 205–226.
- Ratnawati. (2013). *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Wajib Belajar 12 (Dau Belas) Tahun Di Kabupaten Kudus*. Semarang. Retrieved From [Http://Www.Fisip.Undip.Ac.Id](http://Www.Fisip.Undip.Ac.Id)
- Rawita, I. S. (2010). *Kebijakan Pendidikan Teori, Implementasi Dan Monev*. Yogyakarta: Pt. Kurnia Alam Semesta.
- Republik Indonesai. (2008). *Pertauran Pemerintah Repoblik Indonesai Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesai Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta.
- Rusdiana. (2015). *Kebijakan Pendidikan Dari Filosofi Ke Implementasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Saputra, A. (2017). *Implementasi Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 Tentang Organisasi Kemahasiswaan Dalam Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan Di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. *Publico*, 2(1).
- Siolita. (2016). *Implementasi Kebijakan Pendidikan Menengah Universal (Pmu) Di Kota Semarang*. Semarang.
- Soedijarto. (2008). *Landasan Dan Arah Pendidikan Nasional Kita*. Jakarta: Kompas Media.
- Subarsoni. (2005). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sunarno. (2013). *Impelemntasi Kebijakan Pendidikan Sekolah Gratis Program Wajib Belajar 9 Tahun*. Universitas Terbuka.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Aipi.
- Tahir, A. (2012). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kota Gorontalo*. *Jurnal*

*Akuntansi*, Xvi(3), 413–426.

Todaro. (2003). *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ke Tiga*. Jakarta: Erlangga.

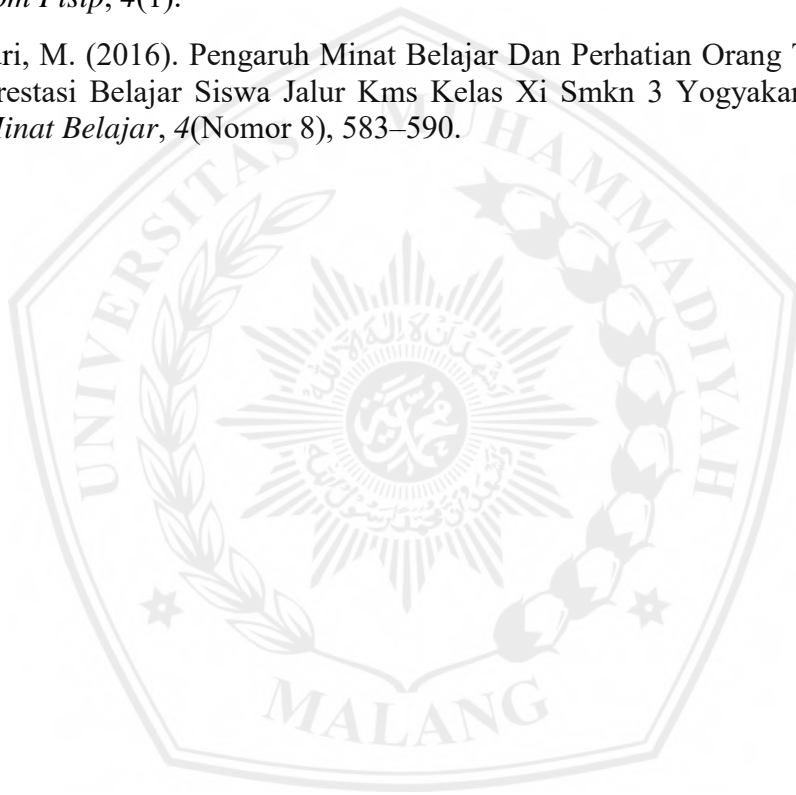
Ulfatin. (2010). Profil Wajib Belajar 9 Tahun Dan Alternatif Penuntasannya.

Wahab, S. A. (2015). *Analisis Kebijakan Dan Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Bumi Aksara.

Wirmansyah, I. (2015). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Provinsi Kalimantan Timur (Studi Kasus Program Wajib Belajar 12 Tahun Di Kota Samarinda). *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(4), 1928–1939.

Zaili. (2017). Pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun Di Kota Pekanbaru. *Jom Fisip*, 4(1).

Zamzuri, M. (2016). Pengaruh Minat Belajar Dan Perhatian Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Siswa Jalur Kms Kelas Xi Smkn 3 Yogyakarta. *Pengaruh Minat Belajar*, 4(Nomor 8), 583–590.



# LAMPIRAN



Catatan hasil wawancara

Nama: :Drs. Basotang, M.Pd

Jabatan : Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Kolaka

Tanggal :

Jam :

Topik Wawancara : Implementasi Kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun Di Kabupaten Kolaka

1. Apa yang bapak ketahui tentang wajib belajar 12 tahun?
2. Siapa saja yang melakukan sosialisai terkait kebijakan wajib belajar 12 tahun dan bagaimana bentuk sosialisasinya?
3. Bagaimana tanggapan masyarakat dan sekolah terhadap kebijakan wajib belajar 12 tahun?
4. Kapan program wajib belajar 12 tahun diterapkan?
5. Bagaimana pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di kabupaten kolaka?
6. Apa saja yang dilakukan dinas pendidikan dalam melakukan pemerataan guru?
7. Apa saja yang dilakukan oleh pemerintah daerah mengenai sarana dan prasarana dalam
8. Apakah anggaran pendidikan di kabupaten kolaka sudah mencukupi untuk pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun?
9. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun?
10. Apa saja upaya yang dilakukan oleh dinas pendidikan untuk mengatasi kendala tersebut?



### **Catatan hasil wawancara**

Nama : Mujabar, S.Pd, M.Si  
Jabatan : Kepala Bagian Pendidikan Dasar Dan Menengah Dinas Kabupaten Kolaka  
Tanggal :  
Jam :  
Topik wawancara : Implementasi Kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun Di Kabupaten Kolaka

1. Apa yang bapak ketahui tentang wajib belajar 12 tahun?
2. Siapa saja yang melakukan sosialisasi terkait kebijakan wajib belajar 12 tahun dan bagaimana bentuk sosialisasinya?
3. Bagaimana tanggapan masyarakat dan sekolah terhadap kebijakan wajib belajar 12 tahun?
4. Kapan program wajib belajar 12 tahun dilaksanakan di kabupaten kolaka?
5. Bagaimana pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di kabupaten kolaka?
6. Apa yang dilakukan dinas pendidikan dalam melakukan pemerataan guru?
7. Apa yang dilakukan pemerintah terkait sarana dan prasarana pendidikan dalam pelaksanaan wajib belajar 12 tahun?
8. Apakah anggaran pendidikan di kabupaten kolaka sudah mencukupi untuk pelaksanaan wajib belajar 12 tahun?
9. Apa saja kendala dalam pelaksanaan wajib belajar 12 tahun di kabupaten kolaka?
10. Apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi kendala tersebut





### **Catatan Hasil Wawancara**

Nama : Baharuddin Kadir S.Pd  
Jabatan : Kepala Sekolah SDN 2 Lamokato  
Tanggal :  
Jam :  
Topik wawancara : Implementasi Kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun Di Kabupaten Kolaka

1. Apa yang bapak ketahui tentang wajib belajar 12 tahun?
2. Bagaimana peran sekolah dalam pelaksanaan wajib belajar 12 tahun?
3. Apakah sarana dan parasarana yang ada di sekolah sudah mendukung?
4. Apakah guru yang ada di sekolah bapak sudah mencukupi untuk pelaksanaan wajib belajar?
5. Apakah anggaran yang ada di sekolah bapak sudah mencukupi untuk pelaksanaan wajib belajar 12 tahun?
6. Apa kendala yang dihadapi sekolah dalam pelaksanaan wajib belajar 12 tahun?
7. Apa upaya yang dilakukan sekolah untuk mengatasi kendala tersebut?



## Catatan Hasil Wawancara

Nama : Abbas S.Pd, M.Pd

Jabatan : Kepala Sekolah SMP 2 Kolaka

Tanggal :

Jam :

Topik wawancara : Implementasi Kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun Di Kabupaten Kolaka

1. Apakah yang bapak ketahui tentang program wajib belajar 12 tahun?
2. Bagaimana peran sekolah dalam pelaksanaan wajib belajar 12 tahun?
3. Apakah sarana dan parasarana yang ada di sekolah sudah mendukung?
4. Apakah guru yang ada di sekolah bapak sudah cukup untuk pelaksanaan wajib belajar?
5. Apakah anggaran yang ada di sekolah bapak sudah mencukupi untuk pelaksanaan wajib belajar 12 tahun?
6. Apa kendala yang bapak hadapi dalam pelaksanaan wajib belajar 12 tahun?
7. Apa upaya yang dilakukan sekolah untuk mengatasi kendala tersebut?



### **Catatan Hasil Wawancara**

Nama : Drs. Abdul Aris, M.Pd  
Jabatan : Kepala Sekolah SMA Negri I Kolaka  
Tanggal :  
Jam :  
Topik wawancara : Implementasi Kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun Di Kabupaten Kolaka

1. Apa yang bapak ketahui tentang program wajib belajar 12 tahun?
2. Bagaimana peran sekolah dalam pelaksanaan wajib belajar 12 tahun?
3. Apakah sarana dan parasarana yang ada di sekolah SMA I sudah mendukung untuk pelaksanaan wajib belajar?
4. Apakah guru yang ada di sekolah bapak sudah cukup untuk pelaksanaan wajib belajar?
5. Apakah anggaran yang ada di sekolah bapak sudah mencukupi untuk pelaksanaan wajib belajar 12 tahun?
6. Apa kendala yang hadapi sekolah dalam pelaksanaan wajib belajar 12 tahun?





## Tesis (Nisa 2)

### ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

Exclude quotes

☐

Exclude matches

☐

Exclude bibliography

☐

